

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem politik sebuah negara kearah yang lebih demokratis. Sementara di bagian wilayah lain tidak jarang kedua fenomena itu saling berbenturan. Dunia Islam tidak luput dari pengaruh fenomena tersebut. Kebangkitan Islam di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim memunculkan isu demokratisasi.¹

Dalam rangka merespon kondisi zaman, terdapat banyak gerakan Islam bermunculan. Semuanya mengusung semangat membangun kembali kejayaan umat yang pernah di raih pada masa lalu. Bersamaan dengan itu, diskusi seputar konsep dan pemikiran keislaman pun merebak. Berbagai telaah dan analisis dilakukan untuk merumuskan konsep dan pemikiran sebaik mungkin, yang dapat mengantarkan umat ini menuju kehidupan yang diidam-idamkan. Dalam merumuskan sebuah konsep ada yang memandang persoalan umat dengan semangat perlawanan yang berlebihan hingga melahirkan konsep yang mengedepankan permusuhan terhadap pihak lain. Ada pula yang dilatar belakangi oleh kekaguman yang berlebihan juga terhadap kemajuan Barat sehingga kurang percaya diri ketika mengaktualisasikan konsep keislamannya. Di antara berbagai konsep itu, ada beberapa gerakan Islam yang dengan arif, cermat dan mendalam dapat merumuskan dan menjalankan hakikat perjuangan Islam yang ketat dengan bingkai syariat namun tetap mengedepankan strategi yang logis dan realistik.²

¹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Teraju, 2002, hal 6-7

² Abdul Hamid Al-Ghazali, 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam; Peta Pemikiran Hasan Al Banna*, terj, Solo; Era Intermedia, hal 5-6.

Adalah Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan internasional, yang di negara asalnya, yaitu Mesir, menjadi organisasi terlarang, mencoba turut serta mengembalikan kejayaan Islam. Lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928 dilandasi oleh sebuah perasaan yang sangat memilukan hati, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki dan penjajahan yang terjadi di negeri-negeri Muslim dan juga yang tak kalah pentingnya adalah keterpurukan moral umat Islam.

Berangkat dari gambaran dunia Islam yang sangat menyedihkan itu, maka umat Islam, khususnya di Mesir membutuhkan sebuah perubahan dan reformasi yang begitu mendasar. Maka sangatlah wajar jika rakyat Mesir simpati kepada sebuah organisasi yang ingin mengadakan perubahan sosial politik di negerinya. Dalam sepuluh tahun pertamanya, semenjak kehadirannya, organisasi ini memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan reformasi moral dan sosial. Setelah merasakan mendapat sambutan yang sangat luas, maka kantor pusat Ikhwanul Muslimin yang tadinya berada di Isma'iliyah pada tahun 1933 dipindahkan ke Kairo ibu kota Mesir.³

Gerakan Ikhwanul Muslimin ini dalam waktu cepat berkembang dan merebut simpati-terutama- kalangan mahasiswa dan kalangan profesional muda yang berpendidikan modern, tidak hanya di Mesir, tapi juga di banyak Negara muslim. Ajakan untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan struktural dan cultural, serta dalam waktu bersamaan memelopori gerakan pemurnian aktifitas keagamaan membuat daya tarik tersendiri dari gerakan ini.⁴

Tidak terkecuali adalah Indonesia, sebuah negeri yang mayoritas penduduknya muslim terkena imbas globalisasi pemikiran keislaman yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin. Perkembangan pemikiran Ikhwanul Muslimin di kalangan aktifis dakwah

³ Munawir Syadzali, 1999. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI press, hal 145.

⁴ Ali Said Damanik, *op.cit*, hal 8.

kampus menjadi semakin semarak dan bergairah setelah pulangnya para sarjana yang kuliah di Timur Tengah, yang notabene banyak bersentuhan secara langsung dengan pemikiran maupun aktifitas Ikhwanul Muslimin di tempat gerakan ini lahir dan berkembang. Para sarjana lulusan universitas-universitas Timur Tengah inilah yang kemudian menjadi fasilitator transformasi pemikiran dan ideologi Ikhwanul Muslimin ke kalangan aktifis dakwah kampus. Mereka banyak menterjemahkan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Selain itu mereka banyak diundang untuk memberikan materi kajian keislaman di kampus-kampus.

Euforia politik pun terus berlangsung ditandai dengan berdirinya partai-partai baru. Para mantan aktifis dakwah kampus generasi pertama dan juga sarjana-sarjana lulusan Timur Tengah yang selama ini aktif di dunia dakwah pun mencoba memanfaatkan situasi yang sedang berkembang. Akhirnya lewat sebuah proses panjang, para pegiat dakwah inipun mendeklarasikan sebuah partai politik yang diberi nama *Partai Keadilan* (PK)⁵, yang dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 15 Rabi'ul Tsani 1419 H bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1998, tetapi sebenarnya Partai ini didirikan pada tanggal 20 Juli 1998.⁶

Sesuai dengan latar belakang pembinaan ideologis yang selama ini mereka dapat dan terapkan, maka ketika gerakan dakwah ini menggunakan partai politik sebagai payungnya ide-ide dan pemikiran Ikhwanul Muslimin tetap melekat kental dalam tubuh gerakan dakwah ini. PK yang pada Pemilu 1999 mendapatkan 1,4 juta suara atau 1,36 % berhasil mendudukkan 7 orang wakilnya di Senayan. PK menempati 7 besar partai pemenang Pemilu. Karena terganjal Undang-undang Pemilu mengenai *Electoral Treshold* (batas suara minimal harus 2 %) maka PK mengubah nama menjadi *Partai Keadilan Sejahtera* (PKS), setelah sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah

⁵ Majalah SAKSI, No 14 tahun V, 22 April 2003, hal 14

⁶ Majalah SAKSI, No 14 tahun V, 22 April 2003, hal 14

ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendeklarasian Partai Keadilan Sejahtera ini dilakukan di lapangan Monas Jakarta pada hari Ahad tanggal 18 Shafar 1424 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2003⁷.

Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah Sebagai Partai Da'wah Penegak Keadilan dan Kesejahteraan dalam Bingkai Persatuan Ummat dan Bangsa, sedangkan Visi Khusus adalah partai yang berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang lahir di masa reformasi. Partai Keadilan Sejahtera baik dalam visi, misi, manifesto maupun dalam tujuannya yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam. Islam adalah sistem yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah suatu tatanan hidup yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi dan negara. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang para pendiri dan pendukungnya meyakini keuniversalan ajaran Islam melingkupi seluruh kehidupan manusia dan kemanusiaan.⁸

Keuniversalan ajaran Islam yang diyakini oleh para pendiri dan pendukung PKS menjadikan PKS sebagai salah satu partai Islam di Indonesia yang mempunyai ideologi yang khas (berbeda) dengan partai Islam lainnya yang ada di Indonesia. Keyakinan tersebut justeru menjadikan PKS sangat mirip dengan pergerakan Islam lainnya di dunia, terutama Ikhwanul Muslimin. Sampai seorang pemikir Ikhwan kontemporer Prof. DR. Yusuf al-Qordhawi mengidentikkan PKS sebagai kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin. H. Anis Matta, Lc tidak menampik pengaruh Ikhwanul Muslimin, tapi ia menegaskan, bahwa pengaruhnya hanya sebatas pemikiran dan wacana saja.⁹ Lepas dari kemiripan tersebut,

⁷ *Ibid*, hal 39

⁸ DPP PK, *Jatidiri PK*, Pustaka Tarbiyatuna, 2002, hal. 20

⁹ Nandang Burhanuddin, *Penegakkan Syari'at Islam Menurut PKS* Jakarta; Al-Jannah Pustaka, 2004, hal. 98

satu hal yang pasti bahwa pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin bisa kita lihat dari kebijakankebijakan dasar partai dalam bidang politik dan pengembangan agama.

Ide-ide pemikiran Ikhwanul Muslimin yang diterapkan oleh PKS yang mulai dari proses kemunculannya sampai sekarang adalah sebuah hal yang cukup menarik untuk diteliti. Karena ide dan gagasan Ikhwanul Muslimin merupakan dua metode gerakan perubahan, yaitu metode Jamaluddin Al Afghani dan metode Muhammad Abduh disertai studi pendalaman dan ketajaman intelektual serta bimbingan dari Allah SWT.¹⁰ Pengaruh Ikhwanul Muslimin yang telah melekat diaplikasikan dengan sangat baik sekali oleh para kader dan aktivis PKS. Hal inilah yang sangat menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam untuk dituangkan ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Pengaruh dan Impikasi Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan terarahnya pembuatan skripsi ini, penulis membatasi masalah kepada Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik dan keagamaan?
2. Bagaimanakah implikasi pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik dan keagamaan?

¹⁰ Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al Banna*, terj, Jakarta; Harakah 2002, hal 1

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin yang ada pada PKS dan juga bagaimana pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin di terima Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai dengan terlebih dahulu mengetahui seperti apa ideologi Ikhwanul Muslimin dan juga dalam hal apa saja Partai Keadilan Sejahtera terpengaruh dan menerapkan ideologi tersebut. Kegunaan penelitian dari pembahasan di atas adalah diantaranya;

1. Untuk dapat menganalisis pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik dan keagamaan.
2. Untuk mengetahui implikasi pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang politik dan keagamaan.

D. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur yang digunakan diantaranya adalah Buku-buku tentang Ikhwanul Muslimin dan pemikiran para tokohnya, antara lain ditulis oleh Taufiq Al-Wai'iy yang dalam edisi terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimin: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*¹¹, buku ini banyak menjelaskan tentang bagaimana sikap ikhwanul Muslimin dalam berjuang di dunia politik dan apa batas-batasannya yang dibolehkan hukum syara' dalam memperjuangkan perilaku politik para tokoh-tokoh ikhwanul muslimin di masa-masa awal.

¹¹ Taufiq Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimun, Studi Analisis Observatif, Dokumentatif*, terj. (Solo Era Intermedia. 2002)

Buku lain yang membahas Ikhwanul Muslimin adalah buku yang berjudul Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan: Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'alim, buku ini ditulis oleh Muhammad Abdullah Al Khatib dan Muhammad Abdul Halim Hamid,¹² yang isinya menjelaskan tentang doktrin yang wajib diamalkan oleh para kader Ikhwanul Muslimin yang kesemuanya berjumlah 10 rukun atau yang terkenal dengan arkanul Bai'ah.

Buku lain yang membahas Ikhwanul Muslimin adalah buku yang berjudul Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin karya Imam Syahid Hasan Al-Banna, buku ini berisi kumpulan surat, makalah, transkrip pidato yang pernah disampaikan oleh Hasan Al Banna sepanjang hayatnya di Medan dakwah dan jihad. Keistimewaan buku ini terletak pada keistimewaan penulisannya dan gerakan dakwah yang dirintisnya, yakni Ikhwanul Muslimin. Kehadiran Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan jawaban terhadap krisis yang tengah melanda umat Islam di abad ini. Hasan Al-Banna sebagai peletak dasar gerakan ini benar-benar memahami karakter krisis tersebut. Kemudian dia berupaya menyusun jawaban yang memadai untuk menanggulangnya.

Buku Risalah Mu'tamat Al Khamis dan Risalah Baina Al Amsi wa Al Yaum, oleh Abu Ridha yang menguraikan tentang implikasi ideologis yang menjadi kerangka pemikiran Hasan Al Banna yaitu *Pertama*, universalitas Islam mengharuskan Islam menyentuh masalah-masalah politik. Oleh karena itu amal politik merupakan implikasi ideologis yang tidak mungkin terhindari. *Kedua*, *daulah* (negara) sebagai institusi politik utama dan memiliki otoritas dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum atau syariah, harus menjadi representatif *fikrah* (ideologi Islam). Sebab penerapan Islam sebagai *manhaj Al Hayah* (sistem hidup) yang sempurna hanya dapat ditegakkan secara utuh melalui

¹² Muhammad Abdullah Al Khatib, Muhammad Abdul Halim Hamid, *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan: Kajian Analitik terhadap Risalam Ta'alim*. Terj. (Bandung, Asy Syamil. 2001)

sebuah daulah Islamiyah yang memiliki legalitas dalam menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mewujudkan kebaikan didunia dan kebahagiaan di akhirat.

Ketiga, adanya kenyataan bahwa setiap muslim harus konsisten dalam merealisasikan Islam sebagai *manhaj al hayah* (sistem hidup). Artinya setiap muslim harus tampil dalam penerapan nilai-nilai Islam . Ia tidak boleh mengelak dari kewajiban itu. Hasan Al Banna menegaskan keterlibatan gerakan dalam *siyasah* (politik) lahir dari pemahanan yang benar terhadap Islam serta penerapan yang akurat terhadap *manhajnya* (pedoman). *Keempat*, keharusan ummat menuntut pemerintahannya agar menerapkan hak-hak ke Islamannya. Oleh sebab itu Hasan Al Banna mendorong umat agar menuntut pemerintah yang mengurus urusannya menerapkan hak-hak *siasah* keIslamannya. *Kelima*, penyadaran dan penyebaran dakwah serta perjuangan konstitusi merupakan *wasilah* (sarana) bagi tegaknya Islam dan Islamisasi masyarakat. Proses penyadaran dan penyebaran dakwah serta perjuangan konstitusi dalam konteks umat merupakan individual dan kolektif. Untuk itu Hasan Al Banna menilai bahwa setiap gerakan Islam, dalam mencapai tujuan gerakannya, harus konsisten dengan penyebaran dakwah dengan hikmah dan *maw'izhah hasanah* (cara dan ketauladanan yang baik) serta keterlibatan langsung dalam kehidupan *siasah*.

Keenam, pemerintahan sebagai pelaksana hukum. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya pemerintahan merupakan salah satu pilar tegaknya Islam. Tegaknya sebuah pemerintahan yang islami adalah tuntutan ideologis *syumuliyatul* (kesempurnaan) Islam. Konsekuensinya semua gerakan Islam harus konsern dengan masalah pemerintahan. Dari keenam kerangka pemikiran Hasan Al Banna diatas, dapat disimpulkan bahwa Politik dan Islam harus teraplikasi dalam kehidupan bernegara.

Buku Fiqh Politik Hasan Al-Banna karya Muhith Muhammad Ishaq berisi tentang teori politik hingga politik praktis yang pernah dilakukan oleh Imam Syahid Hasan Al-

Bana, tentang keyakinan dan amal terdapat 34 bab poin-poin pemahaman politik Hasan Al-Bana.

Buku-buku yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera antara lain adalah karangan Ali Said Damanik yang berjudul Partai Keadilan Sejahtera: transformasi 20 tahun gerakan Tarbiyah di Indonesia.¹³ Dalam buku ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera sejak dari perintisannya yang dimulai dari kalangan kampus sampai dengan tampil terbuka dalam sebuah partai politik.

Kemudian buku yang lain adalah Penegakan Syariat Islam menurut Partai Keadilan Sejahtera oleh Nandang Burhanuddin, buku ini aslinya adalah tesis pascasarjana Universitas Indonesia jurusan Kajian Timur Tengah, buku ini banyak menjelaskan tentang bagaimana perjuangan partai keadilan dalam rangka menerapkan syariat Islam dan juga tentang hubungan antara Islam dan negara.¹⁴

Buku lainnya adalah terbitan DPP partai Keadilan Sejahtera yang berjudul "Menyelamatkan Bangsa Platform dan Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera."¹⁵ Buku ini menceritakan tentang cita-cita politik Partai Keadilan Sejahtera, dimana platform kebijakan yang akan dijalani untuk mensejahterakan rakyat.

Hasil penelitian Mohammad Riza Widyarsa (2011) dengan judul Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa IM dan PKS adalah dua organisasi islam yang sama-sama mengusung prinsip dan nilai bahwa Islam adalah solusi (*Al-Islam Hual Hill*), visi dan misi kedua organisasi islam ini juga relatif sama, itu terlihat dari slogan-

¹³ Ali Said Damanik. *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta, Teraju. 2002.

¹⁴ H. Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan*, Jakarta, Al Jannah. 2004.

¹⁵ DPP PK Sejahtera, *Menyelamatkan Bangsa: Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: Al Itishom, 2004.

¹⁶ Mohammad Riza Widyarsa (2011). Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, Maret 2011 27 Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia.

slogan dan visi misinya yang terkenal seperti Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman hidupku dan Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi. Namun persamaan ideologi PKS dan IM ini diakui tokoh PKS sebagai sebuah kesamaan organisasi dan kebetulan semata dan bukan merupakan sebuah ikatan hirarki organisasi. Secara hirarki struktural, PKS memang tidak memiliki indikasi serta bukti akan keterlibatannya dengan organisasi terbesar dunia tersebut, namun sebagai bukti awal akan keterlibatan PKS sebagai bagian dari gerakan IM adalah pernyataan resmi website IM yang bermarkas di Mesir yang secara gamblang mengatakan bahwa PKS adalah bagian (*Alfar`ul Al-Qathary*) dari gerakan IM. Jika melihat visi misi PKS dan membandingkannya dengan visi misi gerakan IM maka ditemukan dengan kasat mata akan adanya kesamaan ideologi dan visi dalam dua organisasi Islam ini, walau pihak PKS tidak mengakui adanya kesatuan struktur organisasi tetap bersikukueuh bahwa PKS tidak memiliki hubungan apapun dengan IM termasuk hubungan organisasi, walaupun disatu sisi bahwa kedekatan tokoh PKS dengan IM terjalin dengan begitu intens namun itu PKS akui hanya sebatas kedekatan antara sesama muslim semata.

Joni Firmansyah (2014). *Pemikiran Politik Islam : Kajian Strategis Hasan Al Banna* dengan kesimpulan bahwa Sikap pemikiran Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin) terhadap pemerintahan, berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan Aqidahnya. Islam-sebagaimana yang dipersepsikan Ikhwanul Muslimin menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya. Ikhwan memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan Al-Banna ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana memecahkannya berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pilar-pilar itu ada tiga, yaitu : 1. Tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara

kepentingan bersama. 2. Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat. 3. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya, di antara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.¹⁷

E. Kerangka Dasar Teori

Perkembangan pemikiran politik Islam sangat pesat dan kian variatif, Islam yang dahulu sangat dikenal dengan kekuasaan khilafah. Yakni Khilafah Turki Utsmani yang menguasai pentas politik dunia selama 13 abad secara nyata mempersatukan umat Islam dunia dengan berbagai bangsa dan budaya. Namun setelah runtuhnya kekuasaan khilafah tersebut oleh imperialisme barat, maka banyak wilayah-wilayah yang dulu bagian dari wilayah kekuasaan khilafah kini berkembang dengan konsep Nation State. Konsep Nation State yang dalam bahasa Indonesia artinya Negara Bangsa adalah sebuah negara dengan berlandaskan pada konsep nasionalisme. Komunitas manusia yang memiliki pandangan bahwa mereka adalah satu kesatuan dari beberapa kesamaan baik itu etnis, budaya, bahasa, sejarah serta faktor-faktor pemersatu lain. Maka identitas "bangsa" tersebutlah yang dijadikan dasar adanya hak untuk membentuk dan mendirikan sebuah negara. Hingga saat negara terwujud secara nyata maka inilah yang disebut Nation State atau Negara Bangsa.

Dari perkembangan pemikiran Nation State, menjadikan banyak bangsa-bangsa mendirikan sebuah negara dengan masing-masing penyebab yang mempengaruhinya baik secara budaya maupun letak geografisnya menjadi negara dengan konsep Islam formalisme dan Islam substantifisme. Perbedaan konsep tersebut terinterpretasikan bahwa pemikiran Islam

¹⁷ Joni Firmansyah (2014). *Pemikiran Politik Islam : Kajian Strategis Hasan Al Banna*.

formalisme adalah paham yang memandang penerapan nilai-nilai Islam harus secara eksplisit dengan menjadikan hukum-hukum syariat Islam seperti Qishos dan Rajam sebagai hukum positif sebuah negara. Salah satu negara dengan konsep Islam Formalisme ini yaitu negara Arab Saudi.

Sedangkan pemikiran Islam substantifisme adalah paham yang memandang bahwa tidak perlu mendirikan negara Islam, namun nilai-nilai Islam tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bernegara dan menghormati agama lain. Salah satu contoh negara dengan pemikiran Islam substantifisme ini yaitu negara Indonesia yang mana penduduk mayoritasnya muslim.

1. Gerakan Politik Islam

a. Pemikiran Politik Islam Menurut Hasan Al- Banna.

Mesir sebagai background perjuangan Hasan al-Banna merupakan wilayah yang syarat dengan tantangan dakwah Islam waktu itu. Dengan sarana perjuangan yang diwadahi Ikhwanul Muslimin sangat konsen perhatiannya dalam pergerakan politik. Dimana salah satu sisi Tarbiyyah Ikhwanul muslimin yang penting adalah bidang politik. Politik disini, sebagaimana dijelaskan Yusuf al-Qaradhawi, merupakan bidang yang berhubungan dengan urusan hukum, sistem negara, hubungan pemerintah dan rakyat, hubungan antara satu negara dengan yang lainnya dari negara-negara Islam ataupun non Islam, hubungan negara dengan kolonial penjajah, dan hubungan-hubungan yang lainnya dari ketentuan-ketentuan yang sekian banyaknya.¹⁸

Dalam eksistensinya, Mesir menurut Hasan Al- Banna mengalami pembodohan dalam berorganisasi. Hal ini terletak pada klasifikasi organisasi politik dan organisasi

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Bannā*, (Kairo: Maktabah Wahbiyyah, 1992), hal. 51-52 dalam <http://robimulya.blogspot.com/2009/12/politik-islam-dalam-kacamata-hasan-al.html>.

agama. Ada dikotomi/ pemisahan antara agama dan politik dalam organisasi- organisasi di Mesir. Maka terjadi perbedaan konsep, dimana konsep politik bertolak belakang dengan konsep agama. Sehingga organisasi agama, tidak boleh mengurus politik dan organisasi politik tidak dianjurkan untuk mengurus agama. Hasan al-Banna menembus pemahaman adanya dikotomi agama dan politik tersebut untuk meniadakannya. Ia menganggap bahwa hal tersebut merupakan pemahaman yang didasari kebodohan dan hawa nafsu yang dilestarikan oleh kolonial peradaban. Maka menjadi keniscayaan dalam memerangi dan meniadakan pemikiran berbahaya tersebut dengan pemikiran yang benar, yakni kesempurnaan Islam untuk setiap bidang kehidupan, termasuk politik, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, hadits, petunjuk Rasul SAW, sejarah para sahabat, dan amalan umat sepanjang lebih dari 14 abad. Hasan al-Banna mempertegas, "jika kalian ditanya, kepada apa kalian akan menyeru? Maka jawablah: Kami akan menyeru kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan pemerintahan merupakan bagian dari Islam, dan kemerdekaan adalah suatu keniscayaan dari keniscayaan-keniscayaannya." Selanjutnya ia menjelaskan, "jika dikatakan kepada kalian: Ini adalah politik. Maka jawablah: Ini adalah Islam. Kami tidak mengenal pembagian-pembagian ini!"¹⁹

Dalam pemikiran politiknya, setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian beliau dalam mengawal gerak perjuangannya. Keempat point pemikirannya menjadi sisi penting untuk memahami bagaimana ia menggerakkan Ikhwanul Muslimin hingga menjadi organisasi Islam yang menjadi panutan dan rujukan pergerakan ormas Islam lain di beberapa penjuru dunia. Pertama, mengenai konsep Arabisme ('Urūbah). Kedua, konsep patriotisme (Wathaniyyah). Ketiga, konsep nasionalisme (Qaumiyyah). Keempat, konsep internasionalisme (Ālamiyyah).

¹⁹ Ibid

a. Arabisme

Arabisme memiliki tempat tersendiri dan peran yang berarti dalam dakwah Hasan al-Banna. Bangsa Arab adalah bangsa yang pertama kali menerima kedatangan Islam. Dia juga merupakan bangsa yang terpilih. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw, “Jika bangsa Arab hina, maka hina pulalah Islam.” Arabisme menurut al-Banna adalah kesatuan bahasa. Ia berkata dalam Mukhtamar Kelima Ikhwan, “...Bahwa Ikhwanul Muslimin memaknai kata *al-Urūbah* (Arabisme) sebagaimana yang diperkenalkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Mu’adz bin Jabal ra, “Ingatlah, sesungguhnya Arab itu bahasa. Ingatlah, bahwa Arab itu bahasa.” Menurut Al-Banna, Arab adalah umat Islam yang pertama, yang merupakan bangsa pilihan. Islam, menurutnya, tidak pernah bangkit tanpa bersatunya bangsa Arab. Batas-batas geografis dan pemetaan politis tidak pernah mengoyak makna kesatuan Arab dan Islam. Islam juga tumbuh pertama kali di tanah Arab, kemudian berkembang ke berbagai bangsa melalui orang-orang Arab. Kitabnya datang dengan bahasa Arab yang jelas, dan berbagai bangsa pun bersatu dengan namanya.

Selaras dengan penjelasan tersebut, Abdul Hamid al-Ghazali, dalam bukunya *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, mengatakan bahwa dapat disimpulkan beberapa unsur dari pemikiran Al-Banna bahwa berbangga dengan Arabisme tidak termasuk fanatisme dan tidak berarti merendahkan pihak lain. Arabisme dengan tujuan untuk membangkitkan Islam demi tersebarnya Islam adalah dibolehkan.²⁰ Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menelaah apakah Arabisme sama dengan *Chauvivism* Adolf Hitler dalam mempertahankan paham mereka masing-masing. Ternyata, pilihan Arabisme bukanlah sebuah paham, tapi tujuan Hasan Al-Banna yang memilih Arab

²⁰Abdul Hamid al-Ghazali, *Haula Asāsiyyah al-Masyrū’ al-Islāmī li Nahdhah al-Ummah*, terj. Wahid Ahmadi dan Jasiman, (Solo: Era Intermedia), hal. 195, <http://robimulya.blogspot.com/2009/12/politik-islam-dalam-kacamata-hasan-al.html>.

sebagai lokasi dakwahnya guna mempersatukan seluruh negara dan bangsa Arab. Bukan dengan artian menjadikan Arab sebagai ideologi tersendiri dan dianggap paling benar, seperti yang dilakoni Hitler atas bangsa Arya di Jerman.

b. Patriotisme

Dalam memaknai *Wathaniyah* (patriotisme), ada tiga arti yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna, yaitu: *Pertama*, Patriotisme Kerinduan (Cinta Tanah Air). Al-Banna berkata: “Jika yang dimaksud dengan patriotisme oleh para penyerunya adalah cinta negeri ini, keterikatan padanya, kerinduan padanya, dan ikatan emosional dengannya, maka hal itu sudah tertanam secara alami dalam fitrah manusia di satu sisi, dan dianjurkan Islam di sisi lainnya.” *Kedua*, Patriotisme Kemerdekaan dan Kehormatan (Kemerdekaan Negeri). Al-Banna berkata: “Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah keharusan berjuang untuk membebaskan tanah air dari cengkeraman perampok imperialis, menyempurnakan kemerdekaannya, dan menanamkan kehormatan diri dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa, maka kami sepakat dengan mereka tentang itu.” *Ketiga*, Patriotisme Kebangsaan (Kesatuan Bangsa). Al-Banna berkata: “Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah mempererat ikatan antara anggota masyarakat suatu Negara dan membimbingnya ke arah memberdayakan ikatan itu untuk kepentingan bersama, maka kami pun sepakat dengan mereka.”

Ketiga pandangan patriotisme tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan ikatan luhur bangsa Indonesia dalam butir-butir Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Sejarah mencatat bahwasanya Pancasila sangat dipengaruhi oleh daya dan cara piker Islam yang berasal dari Piagam Madinah. Penulis melihat ada kesamaan arti dan makna bagaimana Hasan Al-Banna menginterpretasikan pancasila dalam binkai

Ikhwanul Muslimin dengan Pancasila sebagai kepatriotan bangsa Indonesia.

Patriotisme juga memiliki prinsip lainnya di mata Hasan Al-Banna. Ia mengatakan :

“Suatu kekeliruan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin berputus asa terhadap kondisi negeri dan tanah airnya. Sesungguhnya kaum Muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi negara, habis-habisan berkhidmat untuknya, dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya. Dan anda tahu sampai batas mana mereka menegakkan prinsip patriotisme mereka, serta kemuliaan macam apa yang mereka inginkan bagi umatnya. Hanya saja, perbedaan prinsip antara kaum muslimin dengan kaum yang lainnya dari para penyeru patriotisme murni adalah bahwa asas patriotisme Islam adalah akidah Islamiyah... Adapun tentang patriotisme Ikhwanul Muslimin, cukuplah bahwa mereka menyakini dengan kukuh bahwa sikap acuh terhadap sejengkal tanah yang ditinggali seorang muslim yang terampas merupakan tindakan kriminal yang tidak terampuni, hingga dapat mengembalikannya atau hancur dalam mempertahankannya. Tidak ada keselamatan bagi mereka dari siksa Allah kecuali dengan itu.”²¹

c. Nasionalisme

Dalam pandangan al-Banna, nasionalisme dipahami dalam 5 bentuk. *Pertama*, nasionalisme kebanggaan, yaitu rasa bangga generasi penerus terhadap pendahulunya diiringi adanya tanggung jawab kewajiban untuk mengikuti jejak para pendahulu yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang mesti disembah dan ditaati, Islam sebagai sistem hidup, Muhammad SAW. sebagai nabi dan rasul, lalu menyebarkan Islam sebagai akidah, syari'at dan pandangan hidup, menerapkan hukum dengan keadilan Islam, serta menyinari pola pikir manusia dengan keimanan.

Kedua, nasionalisme kebangsaan, yakni umat suatu bangsa mesti mengorbankan apa yang dimilikinya dari usahanya yang baik untuk menjadikan bangsa yang lebih baik. Nasionalisme ini selaras dengan apa yang ada di dalam Islam, dimana infak hendaknya memperhatikan kebutuhan orang terdekat dan selanjutnya. Allah berfirman,

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum

²¹ Hasan al-Banna. 2008. *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, “Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Solo: Era Intermedia

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Ketiga, nasionalisme jahiliyyah yang berarti nasionalisme yang dianut oleh kaum jahiliyyah. Dimana para penyeru nasionalisme ini berupaya menghidupkan kembali semangat-semangat jahiliyyah yang telah dibumihanguskan oleh Islam, seperti semangat fanatisme kesukuan, sikap sombong, dan merasa lebih dari orang lain. Prinsip-prinsip nasionalisme seperti ini berusaha dihidupkan kembali oleh partai-partai sekuler yang menuduh Islam terbelakang atau kuno, sehingga harus dikikis dari kehidupan. Oleh karena itu, Hasan al-Banna menyatakan bahwa nasionalisme seperti ini amat tercela dan berakibat buruk dan akan meruntuhkan nilai-nilai kemuliaan serta menghilangkan watak-watak terpuji.

Keempat, nasionalisme permusuhan, yaitu nasionalisme yang berlandaskan semangat merampas hak-hak orang lain tanpa alasan yang benar. Semangat seperti merupakan semangat jahiliyyah yang terus berkembang dari dulu sampai sekarang. Bahkan era jahiliyyah dulu ada sebuah sya'ir yang mengatakan, "Siapa yang tidak menganiaya orang lain, maka dia yang akan dianiaya."

Kelima, nasionalisme Islam, yakni nasionalisme yang berlandaskan aqidah, bukan darah, keluarga, kepentingan, dan wilayah geografis tertentu. Ia merupakan nasionalisme yang menghapuskan semangat-semangat jahiliyyah yang mengusung kesukuan dan fanatisme buta, nasionalisme yang menyerap dan menampung seluruh jenis manusia dari suku bangsa, warna kulit, dan negara manapun, tanpa membedakanya. Rasulullah SAW. bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah menghapuskan arogansi jahiliyyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang, karena manusia berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga orang Arab tidak lebih baik dibanding orang A'jam (non Arab), kecuali dengan taqwa.*"

d. Internasionalisme

Internasionalisme menurut Hasan al-Banna inheren dalam Islam, oleh karena Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. “Adapun dakwah kita disebut internasional, karena ia ditujukan kepada seluruh umat manusia. Manusia pada dasarnya bersaudara; asal mereka satu, bapak mereka satu, dan nasab mereka pun satu. Tidak ada keutamaan selain karena takwa dan karena amal yang dipersembahkannya, meliputi kebaikan dan keutamaan yang dapat dirasakan semuanya,” demikian tulisnya.

Konsep internasionalisme merupakan lingkaran terakhir dari proyek politik al-Banna dalam program *ishlāhul ummah* (perbaikan umat). Dunia, tidak bisa tidak, bergerak mengarah ke sana. Persatuan antar bangsa, perhimpunan antar suku dan ras, bersatunya sesama pihak yang lemah untuk memperoleh kekuatan, dan bergabungnya mereka yang terpisah untuk mendapatkan hangatnya persatuan, semua itu merupakan pengantar menuju terwujudnya kepemimpinan prinsip internasionalisme untuk menggantikan pemikiran rasialisme dan kesukuan yang diyakini umat manusia sebelum ini. Dahulu memang harus meyakini ini untuk menghimpun unsur-unsur dasar, lalu harus dilepaskan kemudian untuk menggabungkan berbagai kelompok besar, setelah itu terwujudlah kesatuan total di akhirnya. Langkah ini, menurutnya memang lambat, namun itu harus terjadi.

Untuk mewujudkan konsep ini juga Islam telah menyodorkan sebuah penyelesaian yang jelas bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran masalah seperti ini. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah dengan mengajak kepada kesatuan akidah, kemudian mewujudkan kesatuan amal. Hal ini sejalan dengan firman Allah SAW., *“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan*

apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa yaitu 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.'

Hasan Al- Banna sebagai seorang pemikir Islam memiliki peran yang sangat besar dalam proses meluruskan Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil Alamin*. Konsep dirinya yang menyangkut perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan umat dan perbaikan Negara bertujuan untuk mengembalikan Islam sebagai sebuah peradaban yang harmonis seperti masa- masa keemasan *Khoilafah Islamiyah*. Metode gerakan yang diserukan oleh Ikhwan adalah bertumpu pada tarbiyah (pendidikan) secara bertahap. Tahapan tersebut adalah dengan membentuk pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, pemerintah muslim, Negara Islam, Khalifah Islam dan akhirnya menjadi *Ustadziyatul 'Alam* (kepeloporan dunia). Tentunya, agenda Hasan Al Banna menjadi terhenti manakala dirinya meninggal dengan cara mengenaskan setelah ditembak secara brutal oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dua jam setelah dirinya ditembak, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun paling tidak, hingga hari ini metode dakwahnya dicontoh oleh sebagian besar negara- negara didunia seperti Turki, Mesir dan juga Indonesia. Hasan Al Banna meninggalkan konsep- konsep dakwah nan brilian yang mencoba meluruskan dimana peran agama saat bertemu politik ataupun sebaliknya, karena menurutnya keduanya ialah dua sisi dalam satu keeping mata uang logam, tidak dapat dipisahkan.

2. Partai Politik Islam

a. Definisi Partai Politik

Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seazas, sehaluan, dan setujuan terutama dibidang politik. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yakni yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik- (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan mereka.²²

Lain halnya dengan Bambang Cipto yang mempunyai pandangan bahwa partai politik merupakan peralihan jangka panjang dari istilah fraksi yang jauh lebih tua umurnya, sifat peralihan ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat politik terhadap keberadaan partai penuh dengan kesukaran dan rintangan.²³

Menurut Sumarno dan Yeni Lukiswara, Partai Politik merupakan sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan didalam pemerintah. Jadi partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah.²⁴

Definisi lainnya dikemukakan oleh Cheppy Haricahyono, dalam bukunya “ilmu politik dan perspektifnya” mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.²⁵ Sedangkan menurut Deliar Noer, Partai politik merupakan himpunan orang-orang yang se-ideologi atau tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang – orang yang se-ide, cita-cita dan kepentingan.²⁶

Jadi partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, cet-XIX, 1993, hlm 160

²³ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm 7

²⁴ Sumarno dan Yeni R.Lukiswara, *Pengantar Study Ilmu Politik*, Bandung : Citra Adhya Bakti, 1992, hlm 62

²⁵ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm 192.

²⁶ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali, 1983, hlm 209

untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan umum.²⁷

Dari berbagai pengertian tentang politik, politik Islam dan partai politik maka dapat diketahui bahwa “partai politik Islam” yang penulis maksudkan adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur’an dan Hadits) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.

Atau dapat dikatakan bahwa “partai Islam” merupakan sekelompok orang yang beragama Islam kemudian membentuk sebuah organisasi politik, yang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Partai yang menggunakan Islam (Qur’an, Sunah Rasul dan Syari’ah) sebagai azas dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai.
- b. Partai yang menggunakan Islam (Qur’an, Sunah Rasul dan Syari’ah) sebagai landasan untuk kemantapan perjuangan partai
- c. Partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
- d. Partai yang mempunyai program perjuangan untuk Islam, umat Islam, serta kemaslahatan umat, baik lewat jalur parlementer maupun ekstra parlementer.
- e. Partai mempunyai mempunyai basis pendukung, kader, dan partisan yang keseluruhannya beragama Islam

Ciri diatas merupakan ciri khas partai politik Islam dan yang termasuk kategori partai Islam adalah partai Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nahdlotul Ummah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bintang Reformasi dan masih banyak lagi.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 “Tentang Partai Politik”, Yogyakarta, 2003, hlm 8

b. Definisi Politik Islam (Siyasah Syar'iyah / Fiqh siyasah)

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan 21 memerintah.²⁸ Siyasat bisa juga bermakna pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Kata sasa-sama dengan to govern, to lead, siyasat sama dengan policy (*of government, corprotion, etc*).²⁹ Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut diatas mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka dalam kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadhorotan³⁰

Jadi politik Islam juga mentukan corak sosial, ekonomi, hukum dan berbagai aspek kehidupan bernegara sebagaimana sistem yang diatur dalam fiq siyasah.

Dari definisi diatas dapat ditegaskan bahwa wewenang untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Ada sebuah kaidah Siyasah yaitu: Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus³¹

²⁸ Lois Ma'luf, Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'alam, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986, hlm.362 lihat juga Abu al-fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, lisan al-Arab, Vol.VI, Beirut : Dar Shadir, 1968, hlm 108

²⁹ Haris Sulaiman al-Faruqi, Al- Mu'jam Al-Qanuni, Beirut : Maktabat Lubnan 1983, hlm. 185

³⁰ J. Sujuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (ajaran, sejarah dan pemikiran)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 25

³¹ Ibid, hlm 37.

Oleh sebab itulah segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk tersebut secara substansial tidak bertentangan aturan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pemerintah mempunyai hak untuk ditaati, firman Allah dalam surat An-Nisa':59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil Amri di antara kamu. (QS.An-Nisa':59)

Bila demikian maka Islam sebagai agama mencakup segala hal tentang aspek kehidupan juga memusatkan kajiannya pada bidang-bidang politik yang berhubungan dan berdasarkan pada ajaran Islam (fiqh siyasah).

Namun demikian, nampaknya kebanyakan para penulis teori politik Islam terjebak dalam pandangan idealis historis, tanpa melihat realitas dan bagaimana cara mengaktualisasikan idealisme dan slogan - slogan idealnya. Akhirnya, konsep dan gagasannya hanya bertengger diatas menara gading secara sakral, tanpa pernah menyentuh bumi relitas, tidak di format dengan kemasan modern dan dapat menjawab persoalan sebagian mereka telah berusaha mengkaji konsep Islam tentang sistem pemerintahan dengan kepatuhan pada eksperimen pertama itu, dengan pandangan bahwa ia merupakan eksperimen yang paripurna dan konstitusional seratus persen, tanpa memperhatikan karakter eksperimennya, dan bagaimana kondisi politik, sosial dan historis yang menjadi intrumennya. Sesungguhnya kebutuhan kita yang sangat mendesak kini adalah menemukan format teori politik yang integral”, yang dapat dikaji dan di Reformasi.³²

³² Musthofa Muhammad Thahan, *Rekonstruksi Pemikiran menuju gerakan Islam Modern*, (terjemahan; jasinan LC), Solo : Era Intermeda, 1997, hlm 48

Ini dilakukan agar setiap muslim menjadikan politik sebagai kegiatan integral dari kehidupan yang utuh dan sekaligus berfungsi alat dakwah Islamiyah. Hal itu tentu saja bukanlah politik sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah. Sebab itulah kita mencoba memberikan makna yang pada akhirnya dapat di fahami dan dapat di impementasikan ke dalam kegiatannya dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Namun demikian di kalangan Islam sendiri masih ada perbedaan pandangan tentang Islam dan politik, sehingga Munawir Sadjali mengklasifikasikan menjadi tiga aliran;

Aliran pertama berpendapat : Islam adalah sebuah agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara bernegara. Pada aliran ini umumnya berpendapat bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan/politik. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu/meniru ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan/politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan nabi Muhammad dan khulafa al-Rosyidin. Tokohnya, Hasan al-Banna, Sayid Qutb, Rasyid Ridha, al-maududi)

Aliran kedua : Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan sebagai tokohnya adalah ; Ali Abd al-Raziq dan Thoha Husain.

Aliran Ketiga : Menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran ini

menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara³³

c. Kaidah-Kaidah Umum Yang Mendasari Teori Politik Islam

1. Prinsip-prinsip Politik Islam

Menurut Sujuthi Pulungan dalam bukunya “Fiqh Siyasa (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)” menjelaskan bahwa prinsip-prinsip politik Islam adalah:

1. Prinsip kesatuan dan persatuan umat

Firman Allah :

“Manusia itu adalah umat yang satu” (QS. Al-Baqarah : 213)

2. Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan

Firman Allah :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil “ (QS.Al-Nisa’:58)

3. Prinsip Kepemimpinan

Firman Allah :

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” (QS.Al-Nisa’:59)

³³ Munawir Sadzali, Islam dan Tatanegara, (Ajaran, sejarah, dan pemikiran), Jakarta : UI-press, 1990, hlm.1-2

“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. (QS.Al-Sya’ara’ : 150-152)

4. Prinsip Musyawarah.

Firman Allah :

“...bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan “(QS.Al-Imran : 159)

Firman Allah yang lain :

“Juga mereka yang suka mematuhi seruan Tuhannya, mengerjakan Shalat, menyelesaikan setiap persoalan antar sesamanya secara bermusyawarah, manafkahkan rizki yang telah Kami berikan kepadanya” (QS. Asy-Syura : 38)

5. Prinsip persaudaraan

Firman Allah:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaknalah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat “ (QS.Al-Hujurat:10)

6. Prinsip tolong menolong

Firman Allah:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran“ (QS.Al-Maidah : 2)

7. Prinsip berpendapat dan berserikat

Firman Allah:

“Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan

lisan maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah Iman”
(HR.Ahmad).³⁴

2. Landasan Filosofis Berdirinya Partai Islam

Teori politik Islam harus bertolak dari kaidah - kaidah umum, yakni kebebasan, kesetaraan, keadilan dan supremasi hukum juga konsistensi terhadap prinsip pemilihan pemimpin, bahwa pemerintah adalah pelaksana hukum dan perundang-undangan, pelindung agama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Diantara hak rakyat adalah memberi nasehat, mengevaluasi memecat dan menggantinya jika diperlukan. Sistem politik harus tegak diatas prinsip syuro, dan syuro menjadi sesuatu yang harus di tegakkan oleh penguasa.

Sistem politik Islam harus memuat persepsi yang jelas tentang kebebasan politik, aktifitas politik, partai politik, kritik politik, kebebasan pers, kedudukan wanita, sistem sosial, ekonomi, pemerataan, kelayakan, independensi peradilan.³⁵

Jika demikian maka perlu juga diketahui beberapa hal yang menjadi landasan filosofis berdirinya partai Islam, yaitu :

- a. Kenyataan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi yaitu: memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi yang merupakan aktifitas politik yang paling otentik.
- b. Universalitas Islam telah menjadi inti pemhaman kaum muslimin terhadap konsep-konsep islam dalam seluruh dimensinya. “islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek, Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dn keadilan, kebudayaan

³⁴ Ahmad bin Hanbal, Musnad, jilid III, hlm 20

³⁵ Ibid

dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikroh, akidah yang lurus dan ibadah yang benar-benar keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat.³⁶

Selain itu sistim Politik apabila dikaitkan dengan negara maka sistim politik adalah sebuah konsep yang diterapkan pada situasi konkrit seperti negara. Menurut Miriam Budiarjo sistim politik ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat.³⁷

Salah satu aspek penting dalam sistim politik adalah budaya politik (Political culture) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti; norma-norma, pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat politik di pengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistim, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Umumnya dianggap bahwa dalam sistim politik terdapat empat variabel:

1. Kekuasaan : sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Kepentingan ; tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.

³⁶ Nur Mahmudi Isma'il, M. SC, *Memilih Partai (visi, misi dan persepsi)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998, hlm. 34

³⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta : cet-XIX, 1993, hlm 47

3. Kebijakan ; hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang
4. Budaya politik ; orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.³⁸

Karena beberapa hal itulah maka partai politik Islam mempunyai tujuan untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang berdasarkan ajaran Islam yang kafaah. Sehingga segala kebijakan yang bersangkutan dengan negara dan masyarakat diselesaikan secara musyawarah yang merupakan identitas dan perintah Allah dalam al-Qur'an. Sebenarnya Islam merupakan ajaran yang komprehensif dimana didalamnya juga mengatur banyak hal tentang, ubudiyah, kemaslahatan umat (pranata sosial), serta untuk tentang prinsip-prinsip kenegaraan.

3. Ikhwanul Muslimin

a. Sejarah Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang terbesar di zaman modern ini. Seruannya adalah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta mengajak kepada penerapan syari'at Islam dalam kehidupan nyata. Dengan tegar gerakan ini telah mampu membendung arus sekularisasi di dunia Arab dan Islam.³⁹ Gerakan inilah yang pada gilirannya banyak mewarnai gerakan-gerakan Islam lainnya di dunia. Dengan semangat juang keislaman yang tinggi, di bawah komando pendirinya yakni Hasan al-Banna.⁴⁰

³⁸ Ibid

³⁹ Fathi Yakan, 1998. *Revolusi Hasan al-Banna, Gerakan Ikhwanul Muslimin* dari Sayyid Quthb sampai Rasyid al-Ghannusy, terj . Jakarta; Penerbit Harkah, hal 13 -14

⁴⁰ M. Aunul Abied Shah, 2001. *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, terj Bandung; Mizan, hal 58

Kelahiran Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai sebuah gerakan reformasi Islam, tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh kuncinya yakni Hasan al-Banna. Nama lengkapnya adalah Hasan Ahmad Abdurrahman Al-Banna al-Sa'ati. Beliau lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 M bertepatan dengan 1324 H di kota Mahmudiah, propinsi Buhairoh Mesir. Hasan al-Banna tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama, yang menerapkan Islam secara nyata dalam seluruh aspek kehidupannya.

Ikhwanul Muslimin secara resmi berdiri di Kota Isma'iliyyah, di tepi terusan Suez Mesir, pada awal bulan Dzulqaidah 1347 H/Maret 1928. Ikhwanul Muslimin memiliki 7 dasar-dasar pokok;

1. Adanya aktifitas dakwah
2. Memiliki keistimewaan, kepribadian yang jelas dan memiliki sifat-sifat yang konkret
3. Memiliki kepemimpinan yang berkesadaran tinggi, bijak yang sasaran dan metodenya jelas
4. Memiliki pendukung setia yang siap membawa misi dengan keyakinan dan komitmen yang tinggi
5. Tujuan yang hendak dicapai jelas, tidak tergoyahkan oleh situasi apapun, dan gangguan-gangguan yang menghalangi di tengah jalan
6. Cara-cara untuk mencapai tujuan jelas, diketahui tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya
7. Mempunyai sikap yang jelas terhadap isu-isu yang beredar⁴¹

Hasan al-Banna menyebutkan bahwa karakteristik yang paling utama dari gerakan Ikhwanul Muslimin adalah;

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, 1999. *70 Tahun al- Ikhwan al-Muslimun; Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*, terj, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, hal 17

1. Beroreintasi Ketuhanan (*Rabbaniyah*); maksudnya gerakan Ikhwanul Muslimin berdiri di atas 4 fondasi yang berusaha mendekatkan manusia kepada Tuhannya
2. Bersifat Internasional (*'Alamiyah*); maksudnya gerakan Ikhwanul Muslimin ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, karena manusia pada dasarnya adalah bersaudara, nenek moyang dan keturunan mereka adalah satu (Nabi Adam) tidak ada kelebihan-superioritas- antara yang satu dengan yang lain, kecuali dengan taqwa dan kebaikan serta jasa-jasa yang mereka sumbangsihkan kepada lingkungan masyarakat.
3. Bersifat Islami (*Islamiyah*); maksudnya bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin bersandarkan pada Islam.

Adapun perincian dan tujuan serta orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai berikut;

- a. Memperbaiki diri pribadinya (*Ishlah an-Nafs*) sehingga mempunyai fisik kuat, berakhlak mulia, berintelektual, mampu berusaha, berakidah lurus dan benar-benar dalam beribadah
- b. Membentuk rumah tangga yang Islami (*Ishlah al-Bait al Muslim*) yang mampu membawa keluarganya untuk berpegang teguh pada pemikiran dan etika Islam di dalam setiap perilaku kehidupan rumah tangga
- c. Mengayomi masyarakat (*Ishlah al-Mujtama'*) dengan mengembangkan misi kebaikan dan memerangi kerusakan dan kemunkaran
- d. Membebaskan bangsa (*Tahrir al-Wathan*) dari segala bentuk penjajahan, kekuasaan asing yang non-Islam, baik di bidang politik, ekonomi maupun mental
- e. Memperbaiki pemerintahan (*Ishlah al-Hukumah*) sehingga benar-benar islami
- f. Mengembalikan keberadaan kekuatan internasional ke tangan umat Islam dengan cara membebaskan negara-negara Islam yang terjajah serta membangun kejayaannya

- g. Memimpin dunia, dengan cara menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia sehingga tidak ada lagi fitnah kesesatan dan seluruhnya tunduk kepada agama Allah SWT.⁴²

Dalam kesempatan yang lain Hasan al Banna mengungkapkan bahwa tujuan atau orientasi dari Ikhwanul Muslimin sebenarnya terbatas pada pembentukan generasi baru kaum beriman yang berpegang pada ajaran Islam yang benar, generasi tersebut akan bekerja untuk membentuk bangunan umat ini dengan Shibghat Islamiyah dalam semua aspek kehidupannya. “*Shibghah Allah dan adakah shibghah yang lebih baik dari shibghah Allah*” (QS; al-Baqarah; 138).

b. Ideologi Ikhwanul Muslimin dan Landasan Teologisnya

Pemikiran Ikhwanul Muslimin bersifat komprehensif, tidak mementingkan satu sisi perbaikan dan mengabaikan sisi yang lain. Ikhwanul Muslimin juga selalu gigih di dalam memperluas daerah aktifitas pergerakan dakwahnya sehingga benar-benar bersifat internasional dan mendunia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna adalah sebuah gerakan pemikiran, sehingga dengan pemikiran tersebut gerakan ini menjadi laten yang tidak bisa diberangus oleh siapapun kecuali oleh sang Khaliq. Walaupun gerakan ini telah memasuki masa tribulasi dan dibekukan organisasinya, juga para anggota dan pengurusnya banyak yang dipenjara, tetapi gerakan ini masih tetap bisa bertahan dan malah makin membesar dan meluas ke berbagai belahan penjuru dunia. Hal tersebut di atas dikarenakan sang ideologinya mempunyai orientasi dan pemikiran yang jelas dan terarah dalam membawa organisasi ini dan juga pembentukan para kadernya. Adalah imam Syahid Hasan al-Banna yang merumuskan konsep ideologi yang dikenal dengan nama *Arkanul Bai'ah* (10 Rukun

⁴² Fathi Yakan, *op.cit.*, hal 22

Bai'at) dan juga *Ushul al 'Isyriin* (yang terdiri dari 20 prinsip) yang menguraikan tentang rukun bai'at yang pertama (*al-Fahm*).

Adapun keterangan tentang *Arkanul Bai'ah* (10 rukun Bai'at) adalah sebagai berikut;

a. Rukun Pertama; Al-Fahm (Pemahaman).

Menurut Hasan al-Banna meyakini bahwa fikrah manusia adalah fikrah Islamiyah yang murni serta memahami Islam sebagaimana yang difahaminya dalam batas-batas *Ushul al 'Isyriin* (20 prinsip).⁴³ Pentingnya pemahaman yang benar menurut Hasan al-Banna dapat membantu mewujudkan amal yang benar dan dapat memelihara pemiliknya dari ketergelinciran.

1) Prinsip Pertama; Kesempurnaan Islam

Islam adalah sistem yang menyeluruh yang mencakup seluruh segi kehidupan, maka ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.

Prinsip ini menegaskan hakikat penting dari ajaran Islam yaitu keuniversalan dan keintegralan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

2) Prinsip Kedua; Sumber-sumber Hukum Islam

Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul yang suci adalah rujukan setiap muslim untuk mengenal dan memahami hukum-hukum Islam. Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tanpa "*takalluf*" (sikap memaksakan diri dalam memaknai suatu ayat sehingga melampaui arti sewajarnya) dan "*ta'assuf*" (secara

⁴³ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abdul Halim Hamid; 2005. *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan; Kajian Analitik terhadap Risalah Ta'lim*, terj, (Bandung; Asy-Syamil, 2001) hal 21.

serampangan), sedangkan sunnah suci harus dipahami melalui para ahli hadist yang terpercaya.

Pada prinsip yang kedua ini mempunyai kaitan erat dengan prinsip sebelumnya, dimana pada prinsip yang kedua ini menetapkan referensi yang harus dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan yang tercakup dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

3) Prinsip Ketiga; Iman, Ibadah dan Mujahadah

Keimanan yang murni, ibadah yang benar, dan *mujahadah* (bersungguh-sungguh dalam beribadah) adalah cahaya kelezatan yang Allah curahkan pada hati hamba-hamba-Nya yang dia kehendaki. Sementara ilham, lintasan pikiran, *kasyf* (ketersingkapan rahasia gaib) dalam mimpi-mimpi, itu semua bukan termasuk syari'at Islam. Maka semua itu tidak perlu diperhatikan kecuali bila tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan teks-teksnya.

Pada prinsip ini dijelaskan tentang referensi yang harus dijadikan rujukan oleh setiap muslim dalam mengetahui hukum-hukum Islam dan menjelaskan tentang layak tidaknya referensi tersebut.

4) Prinsip Keempat; Menggunakan Sarana Selama Bukan Sarana Jahiliyah

Jimat, jampi (*ruqyah*), guna-guna, peramalan, perdukunan, mengaku tahu hal-hal ghaib adalah kemungkaran yang wajib diberantas, kecuali jimat yang berasal dari al-Qur'an atau jampi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam prinsip yang keempat ini memfokuskan pembahasannya pada pemurnian akidah dari hal-hal yang dapat mengerukan dan membebaskan akal serta hati dari ketergantungan terhadap berbagai praduga, prasangka dan khurafat.

5) Prinsip Kelima ; Pendapat Imam

Pendapat Imam (pemimpin) dan wakilnya tentang hal-hal yang tidak ada teks hukumnya, hal-hal yang mengandung beragam interpretasi, dan hal-hal yang membawa kemaslahatan umum yang tidak ada nashnya (*Maslahat Mursalah*), harus diamankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at. Pendapat tersebut mungkin akan berubah sejalan situasi, kondisi, adat dan tradisi. Pada dasarnya ibadah adalah kepatuhan total, tanpa mempertimbangkan maknamaknanya, sedangkan adat istiadat (urusan selain ibadah ritual) harus mempertimbangkan rahasia-rahasiannya, hikmah, maksud dan tujuannya.

Pada prinsip ini Imam Hasan Al-Banna menjelaskan beberapa prinsip tentang *siyasa syar'iyah* (kebijakan syariat), hal-hal yang diperbolehkan untuk Imam dan wakilnya serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ia juga menetapkan beberapa kaidah dalam prinsip tersebut, dimana bila kaidah tersebut diabaikan, maka hukum-hukum tidak akan terlaksana, hak-hak akan terlantar, dan pintu-pintu kejahatan serta kerusakan akan terbuka.

6) Prinsip Keenam; Neraca untuk Menimbang Pendapat-pendapat Para

Ulama dan Tata Etika Kepada Para Pendahulu Umat ini. Setiap orang dapat ditolak ucapannya kecuali *al-Ma'shum* (Rasulullah SAW). Segala yang datang dari para pendahulu (*salafus shalih*) yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah kita terima sepenuh hati. Bila tidak, maka al-Qur'an dan Sunnah lebih utama untuk diikuti. Namun demikian, kita tidak boleh mencaci dan menjelek-jelekkkan pribadi mereka dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, serahkan saja pada niat mereka masing-masing, sebab mereka telah memperoleh apa yang telah mereka kerjakan. Prinsip ini menetapkan beberapa hal yang dapat menjaga keistiqamahan seseorang pada jalan yang

lurus; tidak ada sikap berlebih-lebihan dan pengabdian, tidak ada sikap menjilat dan meremehkan, serta tidak ada cacik maki dan kesewenang-wenangan.

7) Prinsip Ketujuh; Ijtihad, Taklid dan Kemazhaban

Setiap muslim yang belum mempunyai kemampuan telaah terhadap dalil-dalil hukum *furu'* (cabang), hendaklah mengikuti salah seorang imam (pemimpin agama). Namun lebih baik lagi sikap tersebut diiringi dengan upaya semampunya dalam memahami dalil-dalil yang dipergunakan oleh imamnya, dan hendaklah ia menerima setiap masukan yang disertai dalil, bila ia dipercaya pada kesalehan dan kapasitas orang yang memberi masukan tersebut. Bila ia termasuk ahli ilmu, maka hendaklah ia selalu berusaha menyempurnakan kekurangannya dalam keilmuan sehingga dapat mencapai derajat penelaah.

8) Prinsip Kedelapan; Perbedaan dalam Masalah Furu' dan Etika dalam Perbedaan

Perbedaan faham dalam masalah-masalah *furu'*, hendaklah tidak menjadi faktor pemecah belah dalam agama, dan tidak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid akan mendapatkan pahala masing-masing, tidak ada larangan melakukan studi ilmiah yang objektif dalam persoalan-persoalan khilafiyah, dalam suasana saling mencintai karena Allah dan tolong menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Studi tersebut tidak boleh menyeret pada debat yang tercela dan fanatik buta. Dalam prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perbedaan faham dalam masalah-masalah dan menjelaskan berbagai pengaruh dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut.

Banyak manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqih, sehingga dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian, fanatisme, debat dan lainnya yang justru menambah kelemahan umat

Islam. Oleh karena sikap yang tepat untuk menghadapi perbedaan pendapat tersebut menurut Hasan al-Banna adalah dengan memelihara kesatuan hati dan kejernihan jiwa.

9) Prinsip Kesembilan; Mempersulit Diri dalam Beragama adalah Dilarang

Memperdalam pembahasan tentang masalah-masalah amal yang tidak dibangun di atasnya (tidak menghasilkan amal nyata) adalah sikap *takalluf* (mamaksakan diri) yang dilarang oleh Islam, misalnya memperluas pembahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi, memperbincangkan makna ayat-ayat al-Qur'anul Karim yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, perdebatan dalam membandingkan keutamaan para sahabat atau memperbincangkan perselisihan yang terjadi diantara mereka, padahal masing-masing memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi SAW serta pahala dari niat mereka.

Prinsip ini meletakkan kaidah yang dapat memelihara muslim dari kesia-siaan tenaga, pemborosan potensi, dan perpecahan sesama, sehingga ia menjadi muslim yang realistis, dinamis, kreatif dan konstruktif (pembangun), bukan muslim yang hanya teoritis, pandai berdebat dan memaksakan diri.

10) Prinsip Kesepuluh; Iman Kepada Allah dan Sifat-sifatnya

Ma'rifah (mengenal) Allah SWT, mengesakan-Nya dan memahasucikan Dia adalah setinggi-tinggi tingkatan aqidah Islam, sedangkan ayat-ayat dan hadist-hadist sahih tentang sifat-sifat Allah adalah *mutasyabihat*, kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa menta'wilkan dan tanpa pengingkaran (*ta'thil*), serta tidak perlu memperuncing perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut, kita mencukupkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Prinsip ini menjelaskan tentang kedudukan *tauhid* (mengesakan Allah) dalam akidah Islam, prinsip ini juga menjelaskan tentang sikap yang moderat dalam menyikapi ayat-ayat dan hadist-hadist sahih yang terkait dengan sifat-sifat Allah.

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata; kami beriman kepada ayat-ayat Mutasyabihaat, semua itu dari sisi Tuhan kami” (QS; al-Imran 3-7)

11) Prinsip Kesebelas; Bid’ah

Segala bentuk bid’ah dalam agama yang tidak mempunyai dasar pijakan tetapi dianggap bagus oleh hawa nafsu manusia, baik penambahan maupun pengurangan, adalah kesesatan yang wajib diperangi dan diberangus dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan keburukan yang lebih parah.

Prinsip ini menegaskan keharusan komitmen pada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta tunduk pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa menambah atau mengurangi, dengan demikian setiap muslim harus menghindari segala bentuk bid’ah dalam agama bahkan harus memeranginya dengan cara yang paling baik.

12) Prinsip Kedua Belas; Jenis-jenis Bid’ah dan Hukumnya

Bid’ah Idhafiyah, *bid’ah Tarqiyah* dan *Bid’ah Iltizam* pada ibadah-ibadah yang *muthlaq* (tidak ditentukan tempat, waktu dan bilangannya) adalah masalah khilafiyah dalam bab fiqih, masing-masing orang mempunyai pendapat dalam masalah tersebut. Namun tidaklah mengapa jika dilakukan penelitian untuk sampai pada hakikatnya dengan dalil dan argumentasi, pada prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan tentang pembagian *bid’ah* serta tingkatan-tingkatan *bid’ah*.

13) Prinsip Ketiga Belas; Mencintai Orang-orang Saleh

Mencintai orang-orang shaleh, menghormati mereka dan memuji mereka karena amal-amal baik mereka yang nampak adalah bagian dari taqarrub kepada Allah SWT, sedangkan para wali adalah orang-orang yang disebut dalam firman Allah SWT; “yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertaqwa”.

Karomah pada mereka itu benar adanya bila memenuhi syar’inya dan harus diyakini bahwa mereka tidak mempunyai mudharat maupun manfaat bagi dirinya

sendiri, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, apalagi bagi orang lain. Prinsip ini menjelaskan sikap yang benar dan obyektif terhadap orang-orang shaleh, para wali dan karamah mereka, yaitu sikap yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikan pihak yang lain.

14) Prinsip Keempat Belas; Ziarah Kubur

Ziarah kubur adalah sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi meminta pertolongan kepada penghuni kubur- siapa pun mereka- berdo'a kepadanya, memohon pemenuhan hajat kepadanya (baik dari dekat maupun dari jauh), bernadzar untuknya, membangun kuburnya, memberinya penerangan dan mengusapnya (untuk mengambil berkah), juga bersumpah dengan selain Allah SWT dan segala sesuatu yang serupa dengannya adalah bid'ah besar yang wajib diperangi. Dilarang keras mencari *takwil* (pembenaran) terhadap amalan-amalan tersebut, demi menutup pintu fitnah yang lebih besar lagi, pada prinsip ini Hasan al-Banna memfokuskan pada pemeliharaan akidah agar tetap bersih, jernih dan bebas dari berbagai *bid'ah* dan *khurafat*.

15) Prinsip Kelima Belas; Doa dan Tawassul

Berdo'a kepada Allah disertai *tawassul* (perantara) dengan salah satu makhluk-Nya adalah perbedaan dalam masalah *furu'* tentang tata cara berdoa, bukan termasuk masalah aqidah. Prinsip ini menjelaskan tentang hukum suatu masalah yang telah lama diperdebatkan di berbagai masjid, majalah dan surat kabar.

16) Prinsip Keenam Belas; Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi yang salah tidak dapat mengubah hakikat arti lafal-lafal yang sudah baku dalam syari'at, maka seharusnya dipahami kembali makna yang dimaksud oleh lafal-lafal syari'at dan tunduk kepadanya. Sebagaimana juga kita wajib berhati-hati terhadap berbagai istilah yang menipu, yang sering digunakan dalam pembahasan masalah-

masalah dunia dan agama. Ibroh (yang dijadikan patokan) itu pada esensi di balik suatu nama, bukan pada nama itu sendiri. Pada prinsip ini Hasan al-Banna menegaskan pengendalian syariat atas perilaku manusia, dan bahwa syariatlah yang berhak menentukan hukum, bukan adapt istiadat dan kebiasaan manusia.

17) Prinsip Ketujuh Belas; Akidah dan Perbuatan Hati ⁴⁴

Aqidah adalah asas bagi aktifitas, amal hati itu lebih penting dari pada amal anggota badan, namun mencapai kesempurnaan pada kedua hal tersebut merupakan tuntutan syari'at, meskipun kadar tuntutan masing-masing berbeda. Prinsip ini menegaskan tentang beberapa hakikat yang telah disyari'atkan oleh al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh rasulullah SAW yaitu beberapa hakikat yang memiliki pengaruh besar pada perilaku seseorang dan pembinaannya.

18) Prinsip Kedelapan Belas; Kedudukan Akal Pikiran

Islam itu membebaskan akal pikiran, menganjurkan penelitian pada alam, mengangkat derajat ilmu dan para ulama, dan menyambut kehadiran segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, "hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman, di manapun didapatkan, ia adalah orang yang paling berhak atasnya". Prinsip ini menegaskan sikap Islam terhadap akal dan ilmu, pada masa di mana akal terpenjara, ilmu terpasung dan manusia membutuhkan pandangan yang jelas terhadap sikap yang benar dan tepat, saat itulah kata – kata ulama harus dikumandangkan.

19) Prinsip Kesembilan Belas; Syariat Lebih Didahulukan Dibanding Akal

Pandangan Syar'i dan pandangan logika memiliki wilayah sendiri-sendiri yang tidak dapat saling memasuki secara sempurna, namun demikian, keduanya tidak akan pernah berbeda dalam hal-hal yang *qath'i* (absolute). Hakikat ilmiah tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syari'at yang shahih, sesuatu yang bersifat *zhanni* (tidak

⁴⁴ M. Abdullah al-Khatib dan M. Abd. Halim; *Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan*, hal 111

qath'i) dari salah satunya harus ditafsiri dengan yang sejalan dengan yang qath'I, bila kedua-duanya bersifat zhanni, maka pandangan syari'at lebih utama untuk diikuti, sampai logika mendapatkan legalitas kebenarannya, atau gugur sama sekali. Prinsip ini menjelaskan wilayah garapan akal serta wilayah garapan syari'at, dalam prinsip ini pula juga menjelaskan bahwa hakikat syari'at tidak akan bertabrakan dengan hakikat ilmu.

20) Prinsip Kedua Puluh; Batas-batas Pengkafiran

Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengamalkan tuntutan-tuntutannya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik karena pendapat maupun kemaksiatannya, kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur, atau mengingkari sesuatu yang telah diakui sebagai asas dari agama, atau mendustakan ayat-ayat al-Qur'an yang sudah jelas maknanya, atau menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, atau melakukan perbuatan yang tidak dapat ditafsiri kecuali kekufuran.

Pada prinsip ini Hasan al-Banna menjelaskan masalah yang paling berbahaya yaitu masalah pengkafiran, ada sebagian kaum yang berlebih-lebihan dalam menyikapi masalah ini, namun ada juga yang mengabaikannya, dan kedua sikap ini tidak terpuji. Dalam hal ini Hasan al-Banna memberikan solusi dengan membawa sikap yang moderat; yaitu tidak mebesar-besarkan masalah dan tidak menganggap enteng masalah tersebut sehingga dapat memelihara pemahaman alakh muslim dari penyimpangan yang berbahaya dan pengabaian yang tercela.

b. Rukun Kedua; al-Ikhlas

Menurut Hasan al-Banna yang dimaksud dengan ikhlas adalah bahwa seorang manusia hendaknya mengorientasikan perkataan, perbuatan dan jihadnya hanya kepada

Allah SWT, mengharap keridhaan-Nya, tanpa mengharapkan keuntungan materi, prestise, pangkat, gelar, kemajuan dan kemunduran. Dengan itulah ia menjadi tentara akidah, bukan menjadi tentara kepentingan dan hanya mencari kemanfaatan dunia.

c. Rukun Ketiga; al-Amal

Dalam kesempatan kali ini Hasan al-Banna menjelaskan tentang nilai sebuah amal, ia menyatakan bahwa sebuah amal merupakan buah dari ilmu dan keikhlasan. Sebuah ilmu akan menjadi cacat dan sangat dangkal, bila tidak dapat mendorong pemiliknya untuk melakukan amal yang positif dan konstruktif. Ilmu dan keikhlasan yang tidak disertai dengan amal nyata ibarat pohon besar dan rindang yang tidak berbuah. Perincian yang amat menarik tentang sifat-sifat al-akh yang tulus yang diutarakan oleh Hasan al-Banna memberikan dorongan kepada para pengurus dan anggota Ikhwanul Muslimin untuk beramal dan memfokuskan perhatian pada amal.

d. Rukun Keempat; Jihad

Urutan jihad yang pertama adalah pengingkaran hati dan puncaknya berperang di jalan Allah SWT, diantara keduanya ada jihad dengan lisan, pena, tangan dan kata-kata yang benar dihadapan penguasa yang zhalim, tanpa jihad dakwah tidak akan pernah hidup. Ketinggian dan luasnya cakrawala dakwah menjadi tolak ukur bagi sejauhmana keagungan jihad di jalan-Nya, besarnya harga yang harus dibayar untuk mendukungnya, dan banyaknya pahala yang disediakan untuk para aktifisnya.

e. Rukun Kelima; at-Tadhiyyah (Pengorbanan)

Yang dimaksud dengan *at-Tadhiyyah* adalah mengorbankan jiwa, harta, waktu, kehidupan dan segala-galanya demi mencapai tujuan, tidak ada jihad di dunia ini yang tidak disertai dengan pengorbanan.

f. Rukun Keenam; at-Tha'ah (Ketaatan)

Maksud dari *at-Tha'ah* adalah melaksanakan perintah dan merealisasikan dengan serta merta baik dalam keadaan sulit maupun mudah, saat bersemangat maupun malas.

g. Rukun Ketujuh; ats-Tsabat (Keteguhan)

Yang dimaksud dengan *ats-Tsabat* adalah bahwa hendaknya seorang alakh senantiasa bekerja sebagai mujahid dalam memperjuangkan tujuannya, betapapun jauh jangkauan dan lama waktunya sampai bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan seperti itu, ia akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan yaitu mencapai hidup mulia atau mati syahid.

h. Rukun Kedelapan; at-Tajarrud (Loyalitas)

Tajarrud (kemurnian dan totalitas) artinya tulus pada fikrah dan membersihkannya dari prinsip-prinsip lain serta pengaruh orang lain.

i. Rukun Kesembilan; al-Ukhuwwah (Persaudaraan)

Ukhuwwah merupakan wujud dari keimanan, sedang perpecahan wujud dari kekufuran, oleh karena itu hendaknya berbagai hati dan ruh berpadu dengan ikatan akidah, karena akidah adalah ikatan yang paling kokoh dan paling mahal.

j. Rukun Kesepuluh; ats-Tsiqah (Kepercayaan)

Yang dimaksud dengan *Tsiqah* adalah rasa puasny sorang *jundi* (prajurit) Allah terhadap *qa'id* (pimpinannya) dalam hal kemampuan dan keikhlasannya, dengan kepuasan yang mendalam yang dapat menimbulkan rasa cinta, penghargaan dan penghormatan ketaatan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Ikhwanul Muslimin adalah tegaknya Daulah Islam dan Khilafah Islam, atau dengan kata lain tegaknya agama yang diridhai Allah SWT agar dipeluk oleh semua manusia sampai hari kiamat. Dengan demikian khilafah

akan tegak apabila pemahaman terhadap Islam benar dan menyeluruh, yaitu pemahaman yang murni dan jernih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW telah dimiliki oleh kaum Muslimin, sebab tidak mungkin agama ini kokoh atas dasar yang parsial, menyimpang apalagi keliru.

F. Definisi Konsepsional

1. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau) negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dan melaksanakan tujuan-tujuan itu
2. Partai politik Islam adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur'an dan Hadits) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.
3. Ihwanul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan Islam yang mempunyai seruannya adalah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta mengajak kepada penerapan syari'at Islam dalam kehidupan nyata dan mempunyai karakteristik Ketuhanan (*Rabbaniyah*); bersifat Internasional (*'Alamiyah*) dan bersifat Islami (*Islamiyah*).
4. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara demokratis.

G. Definisi Operasional

Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.²³

Penelitian terhadap Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, akan menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Politik

Diukur dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan PKS diantaranya Sumuliyah, Al-Islah, Al-Syari'ah, Al-Wasath, Al-Istiqamah, Al-Numuw wa Al-Tathawwur, Al-Tadaruj wa Al-Tawazzun, Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah, Al-Mustaqbaliyah, Al-Alamiyah.

2. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Dakwah

Dapat dilihat dari tahapan dakwah yang digunakan PKS sebagai berikut Tabligh, Ta'lim, Takwin, Tandzim dan Tanfidz.

H. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Selain itu, batasan masalah dalam sebuah penelitian digunakan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik. Dengan adanya penegasan tentang batasan-batasan penelitian, maka hal tersebut menjadi panduan dalam melakukan penelitian dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi kajian penelitian pada Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia di bidang politik, bidang dakwah, pembinaan kader dan konsep negara Islam.

I. Metode Penelitian

Untuk meneliti Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui pencarian sumber data tertulis.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Kajian studi pustaka yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olahan filosofis teoritis. Bentuk kajian ini digunakan untuk mengetahui ide-ide dan pemikiran tokoh dan juga digunakan untuk mengetahui biografi dalam telaah historis. Studi pustaka ini mengandalkan interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada koleksi dokumentasi (data yang berupa teks) yang relevan dan analisis historis agar terbangun suatu pemahaman interpretative yang mendalam dan memadai tentang konsep sedang dikaji. Studi pustaka menurut Anton Bekker merupakan bagian dari kerangka penelitian historis faktual yaitu penelitian yang menekankan pada pemikiran orang lain.⁴⁵

Dari uraian diatas, maka hal tersebut dijadikan landasan dalam penelitian penelitian ini. Beranjak dari landasan itu, langkah selanjutnya adalah mengadakan interpretasi dengan analisis atau menguraikan data-data untuk melihat Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia

2. Fokus Penelitian

⁴⁵ Bekker, Anton. 1986. *Metode-metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 56

Penelitian ini mengkaji Pengaruh dan implikasi Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera melalui sumber tulisan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga dalam pelacakan sumber data didasarkan pada penggolongan data primer, data sekunder maupun data tersier.

Sumber data ini terdiri atas data primer meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta data sekunder yang terdiri dari buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Semua data dalam topik penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan sumber-sumber data dari pustaka-pustaka yang sudah ada yang berkaitan dengan sketsa topik penelitian ini, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh apakah benar atau tidak dengan jalan membandingkan dengan tulisan-tulisan lain, dalam jurnal-jurnal, ensiklopedia, atau internet. Sumber data pustaka dalam penelitian ini diantaranya buku berjudul Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimin yang ditulis oleh Taufiq Al Wai'iy, buku tentang Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan ditulis oleh Muhammad Abdullah Al Khatib dan Muhammad Abdul Halim Hamid, buku berjudul Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin karya Imam Syahid Hasan Al Banna, buku Risalah Mu'tamat Al Khamis dan Risalah Baina Al Amsi wa Al Yaum oleh Abu Ridho, buku Fiqh Politik Hasan Al Banna karya Muhith Muhammad Ishaq, serta buku berjudul Partai Keadilan Sejahtera : tranformasi 20 tahun gerakan Tarbiyah di Indonesia. Data-data itulah yang akan dijadikan bahan dan materi penelitian.

4. Model Analisis

Untuk menganalisis data pustaka yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan masalah dari sumber-sumber yang telah ditentukan dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Penulis juga menggunakan metode Komparatif; yakni mencari persamaan-persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih yang kemudian dibandingkan dantara keduanya, untuk menghasilkan data yang valid dan objektif.